

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, Dedi. (2017). *Visum et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*. Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau.
- Aflanie, Iwan (et.al). (2017). *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Atang, R. R. (1991). *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*. Bandung: Transito
- Bakhri, Syaiful. (2009). *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Total Media
- Brian Inners. 2006. *Rahasia Tentang Penyelidikan Forensik*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Chazawi, Adami. (2001) *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, Adami. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Dahlan, Sofwan. (2000). *Ilmu Kedokteran Forensik Pedoman Bagi Dokter Dan Penegak Hukum*. Semarang: Balai Penerbit Universitas Diponegoro.
- Dahlan, S. (2002). *Ilmu Kedokteran Forensik Pedoman Bagi Dokter Dan Penegak Hukum*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
- Danis, Difa. (2009). *Kamus Istilah Kedokteran*. Gitamedia Press.
- Dudley, H. A. F. (2000). *dkk, Pedoman Tindakan Praktis Medik dan Bedah*. Jakarta: EGC
- Hamzah, Andi. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M.Yahya. 1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Pustaka Kartini
- Hiariej, Eddy O.S. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga

- Idries, Abdul Mun'im dkk. (2009). *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik Bagi Praktisi Hukum*. Jakarta: CV Sagung Seto.
- Jauhani, Muhammad Afifatul. 2020. *Dilema Kapabilitas dan Imparsialitas Dokter Sebagai Mediator Sengketa Medis*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Kusuma, M. Soekry Erfan. dkk. (2012). *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*. Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.
- Kamus Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
- Lamintang, P. A. F. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Cetakan Keempat)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P.A.F., (2012), *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2010). *Delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh & kesehatan*. Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F, dan Theo Lamintang. (2010). *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril. (2004). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Mansjoer, Arif. (2000). *Kapita Selekta Kedokteran Edisi Ketiga Jilid 2*, Jakarta: Media Aesculapius Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
- Marpaung, Leden. (2012). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan ketujuh*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Mertokusumo, Sudikno. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Nugroho, Hibnu. (2010). *Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Undip

- Ohoiwutun, Y. A. (2016). *Ilmu kedokteran forensik (interaksi dan dependensi hukum pada ilmu kedokteran)*. Yogyakarta: Pohon Cahaya
- Prodjohamidjojo, Martiman. (1983). *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pusat Data dan Analisis Tempo, 2022, *Yang Tersebut Karena Yosua*, Jakarta: Tempo Publishing,
- R.Soesilo. (1982). *Hukum Acara Pidana*. Bogor: Politeia.
- Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni
- Setiady, Tolib. (2009). *Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Bandung: Alfabeta.
- Subekti, R. (2010). *Hukum Pembuktian Cetakan 18*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- S, Achmad, Soemadip, Romli Atmasasmita. (1979). *Sistem Pemasarakatan di Indonesia (Cetakan 1)*. Bandung: Bina Cipta
- Setiady, Tolib. (2018) *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Orientasi Kepustakaan Praktis*. Bandung: Alfabeta.
- Siahaan, Monang. (2016). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Grasindo
- Subekti. (2001). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Wahid, Fathul. 2002. *Kamus Istilah Teknologi Informasi*, Edisi 1. Yogyakarta: Andi.
- Waluyadi, 2005, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Prospektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, PT. Penerbit Djambatan
- Atang, R. R. (1991). *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*. Bandung: Transito
- Yudianto, A. (2020). *Ilmu kedokteran forensik*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Makalah, Jurnal, Artikel, Prosiding dan Surat Kabar

- Almaidah. (2022). Tesis: *Pertanggungjawaban Hukum Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan Dengan Menggunakan Produk Kesehatan Dari Multilevel Marketing (MLM)*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Ante, Susanti. (2013). Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana. *Lex Crimen*. Vol. 2, No. 2.
- Australian Medical Association. (2011). *Ethical Guidelines for Doctors Acting as Medical Witnesses. AMA Position Statement*.
- Batas, Ewin Meywan, (2016). Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, Vol. V No. (2).
- Debby Natalia Ang, (2015), Tinjauan Yuridis Terhadap Perluasan Alat Bukti Penyelesaian Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 1.
- Iriyanto, E., & Halif, H. (2021). Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 1
- Habiburrahman, Muhammad, dan Aria Yudhistira, (2021). Autopsi Virtual (Virtopsy): Tinjauan Etik, Bioetika, Sosial, Budaya, Agama, dan Medikolegal. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*. Vol. 5 No. 1.
- Hadi, S. N., & Hasibuan, S. F. L. (2022) Analisis Pembongkaran Jenazah Dalam Prespektif Kedokteran Forensik Untuk Melakukan Otopsi Yang Kedua. *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 3, No. 2
- Hasan, Astuti. 2016. Keterangan Ahli Sebagai Alat Pembuktian Atas Adanya Tindak Pidana Menurut KUHP. *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 2
- Imbiri, M. (2022). Peran Ahli Kedokteran Forensik Dalam Perkara Pidana Pembunuhan Berencana. *Lex Crimen*, Vol. 11, No. 5
- Krisyanti, Luh Putu. (2020). Saksi Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 9.
- Kumean, Putri G. (2018). Kewenangan Dan Kewajiban Dokter Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Zat-Zat Berbahaya Atau Racun. *Lex Crimen*, Vol. 7 No. 8

- Putra, Aska Winarta, dkk. 2017. Kajian Tentang Penggunaan Keterangan Ahli Hukum Pidana Dalam Praktik Pembuktian Perkara Pidana. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6, No. 2.
- Rompas, Amelia Fransiska. (2015). Kajian Yuridis Pasal 134 KUHP Tentang Bedah Mayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia. *Lex et Societatis*, Vol. 3 No. (1).
- Sampurn, Budi. 2012. Bukti Medis Versus Bukti Hukum. *Indonesian Journal of Legal and Forensic Science*. Vol. 2, No. 2, hal. 27.
- Siregar, Ruth Marina Damayanti. (2015). Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana. *Jurisprudence*. Vol. 5, No. 1.
- Sitorus, Hotman. 2019. Hakim Tidak Terikat Terhadap keterangan Ahli. *Yure Humano*. Vol. 3, No. 1.
- Susanti, Rika. (2013). Peran Dokter sebagai Saksi Ahli Di Persidangan. *Jurnal Kesehatan Andalas*, Vol.2, No. 2
- Widiantari, Ni Putu P. Novi, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Sukaryati Karma. (2022). Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Menentukan Tuntutan Pidana terhadap Kasus Penganiayaan Berat. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 3, No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)

_____. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

_____. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

_____. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Kedokteran Untuk Kepentingan Hukum

_____. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian

_____. Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2012

